

PPP Butuh Wajah Baru? Ustadz Adi Hidayat Dikampanyekan Gantikan Figur Lama

Category: NASIONAL, POLITIK

written by Redaksi | May 16, 2025



SEANTERONEWS.com – Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Agustus atau September 2025 mendatang, eskalasi [Politik](#) partai berlambang Kabah meningkat.

Sejumlah tokoh baik dari internal maupun eksternal digadang mulai masuk bursa calon ketua umum (caketum).

Mulai dari tokoh internal seperti Muhamad Mardiono yang saat ini menjabat Plt ketum, Muhammad Romahurmuziy, Sandiaga Salahudin Uno, Amir Uskara dan Taj Yasin Maimoen, hingga Suharso Monoarfa.

Adapun tokoh eksternalnya antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Menurut Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam, jika PPP serius inginkan perubahan, maka sebaiknya tokoh-tokoh lama harus sadar diri untuk tidak lagi mencalonkan lagi maju di Muktamar. Sehingga, PPP tidak semakin terjerumus

ke jurang kehancuran.

Pasalnya, PPP yang notabene partai bersejarah justru tidak lolos ambang batas parlemen di Pemilu 2024 kemarin.

“Mardiono dan Romahurmuziy tiarap dulu, jangan muncul dan menunjukkan lagi ke publik, karena mereka telah gagal membawa PPP melenggang ke Senayan,” kata Anam kepada RMOL, Kamis 15 Mei 2025.

Anam menilai, PPP harus mencari tokoh netral yang dapat membawa simpati ummat. PPP sebagai partai ummat sudah sepatutnya mencari sosok alternatif yang dapat menyatukan umat.

“Saya lihat kriteria yang dapat membawa PPP ke jalan Persatuan adalah Ustaz Adi Hidayat. Beliau banyak penggemarnya, banyak massanya dan tentu sangat diterima disemua kalangan,” kata dia.

Ustaz Adi Hidayat (UAH), kata Anam, adalah sosok yang menentramkan dan diyakini dapat membawa umat bersatu untuk memilih dan menarik simpati publik.

“Sangat mungkin jika PPP memilih Ustaz Adi Hidayat maka akan membawa PPP ke kejayaan masa lalu dan kembali meraih kursi di Senayan,” kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) ini.

Menurut Anam, sangat disayangkan jika PPP masih belum menyudahi kemelut internal dan masih memikirkan kekuasaan pribadi.[]